



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 12.757.833.199.492,51
b. Belanja	<u>Rp 13.748.313.016.644,99</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 990.479.817.152.48)

c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	1.076.160.606.520,79
- Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>4.698.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	1.071.462.606.520,79
SiLPA	Rp	80.982.789.368,31

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.617.829.797.914,49 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 14.375.662.997.407,00
 - b. Realisasi Rp 12.757.833.199.492,51
 - Selisih kurang Rp 1.617.829.797.914,49
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.1.643.524.392.612,01 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 15.391.837.409.257,00
 - b. Realisasi Rp 13.748.313.016.644,99
 - Selisih kurang Rp 1.643.524.392.612,01
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp25.694.594.697,52 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp 1.016.174.411.850,00)
 - b. Realisasi defisit setelah perubahan Rp 990.479.817.152,48
 - Selisih lebih Rp 25.694.594.697,52
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.986.194.670,79 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 1.072.174.411.850,00
 - b. Realisasi Rp 1.076.160.606.520,79
 - Selisih lebih Rp 3.986.194.670,79

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp51.302.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran
 - pembiayaan setelah perubahan Rp 56.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 4.698.000.000,00
 - Selisih kurang Rp 51.302.000.000,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp55.288.194.670,79 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan neto
 - setelah perubahan Rp 1.016.174.411.850,00
 - b. Realisasi pembiayaan neto Rp 1.071.462.606.520,79
 - Selisih lebih Rp 55.288.194.670,79

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 1.076.160.606.520,79
- b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 80.982.789.368,31

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset Rp 24.392.124.270.266,11
- b. Jumlah Kewajiban Rp 2.819.161.340.236,26
- c. Jumlah Ekuitas Rp 21.572.962.930.029,85

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp 12.993.021.336.321,18
- b. Beban Rp 12.241.173.857.333,94
- c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp 751.847.478.987,24
- d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00

e. Surplus/Defisit dari Pos Luar		
Biasa	Rp	<u>0,00</u>
f. Surplus/Defisit Laporan		
Operasional	Rp	751.847.478.987,24

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	1.076.203.399.274,79
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.639.072.946.011,88
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp	2.629.552.763.164,36)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp	4.698.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	(Rp	9.448.825,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023	Rp	81.035.030.947,31

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	20.544.565.494.335,85
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	751.847.478.987,24
c. Koreksi Ekuitas	Rp	276.549.956.706,76
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp	21.572.962.930.029,85

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri dari:
 - Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 September 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 September 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

huruf a : Pendapatan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp 7.225.688.105.702,51
- Pendapatan Transfer	Rp 5.443.196.241.831,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 88.948.851.959,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 12.757.833.199.492,51

huruf b : Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp 8.029.171.006.323,08
- Belanja Modal	Rp 2.629.552.763.164,36
- Belanja Tak Terduga	<u>Rp 57.501.409.671,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 13.748.313.016.644,99
Surplus/Defisit	(Rp 990.479.817.152,48)

huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 1.076.160.606.520,79
- Penerimaan Piutang Daerah	<u>Rp 0,00</u>

	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Daerah	Rp 1.076.160.606.520,79
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah:	
	- Transfer ke dana cadangan	Rp 0,00
	- Penyertaan Modal	Rp 4.698.000.000,00
	- Pembayaran Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Daerah	Rp 4.698.000.000,00
Pasal 3	: Cukup jelas	
Pasal 4	: Cukup jelas	
Pasal 5	:	
	huruf a : Aset terdiri dari:	
	- Aset Lancar	Rp 322.466.761.936,08
	- Investasi Jangka Panjang	Rp 4.465.839.894.981,13
	- Aset Tetap	Rp 17.133.873.326.935,67
	- Aset Lainnya	Rp 2.469.944.286.413,23
	huruf b : Kewajiban terdiri dari:	
	- Kewajiban Jangka Pendek	Rp 2.340.604.601.026,26
	- Kewajiban Jangka Panjang	Rp 478.556.739.210,00
	huruf c : Cukup jelas	
Pasal 6	:	
	huruf a : : Cukup jelas	
	huruf b : : Cukup jelas	
	huruf c : : Cukup jelas	
	huruf d : : Cukup jelas	
Pasal 7	:	
	huruf a : Cukup jelas	
	huruf b : Cukup jelas	
	huruf c : Cukup jelas	
	huruf d : Cukup jelas	
	huruf e : Cukup jelas	

huruf f Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Kas Daerah	Rp	66.901.818.653,93
- Kas di BLUD	Rp	11.072.935.423,38
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	17.127.463,00
- Kas di Dana Bos	Rp	2.253.867.869,00
- Kas Lainnya	Rp	789.281.538,00

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas